

RETORIKA MEDIA TENTANG TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: ANALISIS WACANA PADA BERITA-BERITA BERTOPIK TOLERANSI AGAMA PADA SITUS PEMBERITAAN *DETIK.COM* DAN *KOMPAS.COM*

Oleh : Triyono Lukmantoro

Abstract: *This research is motivated by a number of intolerance that occurred in Indonesia. The persons who are victims in the incident was a religious minority. The purpose of the study was to describe the themes of rhetoric displayed by Detik.com and Kompas.com in highlighting cases of Shia Sampang, Madura, which became one of the events among religious intolerance. In addition, this study aims to outline the techniques of journalism and language used by Detik.com and Kompas.com in running the rhetoric of religious tolerance. Results of this study indicate that the themes presented Detik.com is the root problem, the solution, and the attitude of the government; relocate or expel refugees; rejection by majority and resistance reactions by minority, as well as punished minorities and the majority were released. Meanwhile, the themes presented by Kompas.com rhetoric is a lawsuit against the government's attitude; refugees want to return home; Shias forced repent and Religious Affairs Minister refused reconciliation.*

Keywords: *media, religious tolerance, majority-minority relations, Shia Sampang*

Pendahuluan

Kasus-kasus intoleransi beragama, yang merupakan paradoks dari himbauan tentang pentingnya toleransi antarumat beragama, dapat diketahui dalam pemberitaan media massa. Peristiwa-peristiwa kekerasan yang mengekspresikan aksi-aksi yang bertentangan dengan toleransi antarumat beragama tersebut secara rutin ditampilkan media. Bahkan, dapat dikatakan media memiliki agenda tersendiri untuk menampilkan kasus-kasus intoleransi tersebut justru untuk memberikan penekanan tentang pentingnya toleransi antarumat beragama. Ketika media memuat pernyataan Presiden Yudhoyono pada puncak perayaan 150 tahun berdirinya Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bahwa toleransi dan saling menghargai adalah harga mati karena dengan hal itu bangsa lain menghormati kita (*Sinar Harapan*, 5 Desember 2011), maka dapat diandaikan pernyataan itu merupakan aspirasi yang dikehendaki media juga. Pernyataan yang disampaikan narasumber media, dengan demikian, dapat dipandang sebagai retorika media.

Salah satu peristiwa toleransi antarumat beragama yang juga banyak disorot dalam pemberitaan media adalah serbuan yang dilakukan kelompok muslim Sunni terhadap kaum muslim

Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Peristiwa itu sendiri sebenarnya terjadi pada 26 Agustus 2012. Hanya saja selama awal dan pertengahan 2013, kasus penyerbuan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas tersebut masih mendapatkan perhatian yang sangat luas dalam pemberitaan media. Sebabnya adalah peristiwa itu tidak hanya berhenti pada kasus kekerasan yang secara aktual memang terjadi, melainkan kemunculan sejumlah pokok persoalan penting yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan toleransi antarumat beragama. Pokok-pokok persoalan yang dimaksudkan adalah sikap pemerintah terhadap kasus itu sendiri, aksi-aksi yang dilakukan oleh para pengikut Syiah di Sampang yang menuntut pemerintah agar mereka segera dipulangkan ke kampung halaman, dan perdamaian yang hendak dirintis dari bawah namun justru ironisnya dicurigai oleh pihak pemerintah pusat.

Dalam menyajikan kasus "Syiah Sampang" itu sudah pasti media memiliki berbagai strategi atau cara untuk memberikan penekanan tentang pentingnya toleransi antarumat beragama. Secara tegas dapat dikemukakan bahwa strategi, cara, teknik, atau pun mekanisme media dalam menyajikan suatu peristiwa sehingga menghasilkan pemberitaan untuk memproduksi teks-teks dengan makna tertentu disebut retorika media. Paul Long dan Tim Wall (2012) menyatakan bahwa retorika

media merupakan keterlibatan personal para produser dalam media untuk menghasilkan teks melalui berbagai teknik tertentu. Retorika dalam domain itu dapat dimengerti sebagai konstruksi dan manipulasi bahasa yang dijalankan oleh pencipta (kreator) teks dengan tujuan tertentu. Artinya ialah setiap retorika memiliki agenda atau pesan tertentu juga.

Dengan demikian dapat diberikan penegasan bahwa retorika media merupakan teknik-teknik linguistik yang digunakan oleh para pencipta teks untuk mengemukakan tujuan tertentu. Retorika media itu dapat dilihat pada teks yang dihasilkan oleh para pencipta teks. Retorika memang dapat dimengerti sebagai seni berpidato atau secara luas merupakan seni untuk berbicara. Dalam sudut pandang demikian, media dengan cara meminjam pernyataan-pernyataan narasumber terpilih dan menyoroti kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan persoalan toleransi antarumat beragama juga sedang menyampaikan retorika tertentu untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya.

Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Detik.com* dan *Kompas.com*. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa kedua situs pemberitaan itu banyak dibaca oleh masyarakat. Selain itu, kajian terhadap media yang menerapkan jurnalisme online penting dilakukan untuk melihat kontinuitas dan frekuensi media tersebut dalam memberikan sorotan terhadap kasus tertentu, dalam hal ini Syiah Sampang. Bukan hanya persoalan aktualitas yang mendapatkan sorotan dalam jurnalisme online, namun teknik jurnalisme dan mekanisme kebahasaan—dua hal utama dalam retorika media—yang terdapat di dalamnya memang sangat pantas untuk dibahas.

“Syiah Sampang” merupakan salah satu peristiwa besar yang secara masif mendapatkan perhatian dari media online. Persoalannya adalah bukan saja peristiwa itu pantas untuk dikemas sebagai berita yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi, lebih dari itu, kejadian tersebut telah dijadikan materi retorika media untuk memberi penekanan betapa penting toleransi antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat yang memiliki watak kemajemukan. Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Tema-tema apa saja yang dijadikan retorika media, dalam kasus ini *Detik.com* dan *Kompas.com*, dalam menyoroti peristiwa “Syiah Sampang” untuk memberikan fokus perhatian dalam isu utama toleransi antarumat beragama? Apa saja teknik-teknik yang digunakan media online itu dalam menyampaikan retorika tentang toleransi

antarumat beragama dalam kasus “Syiah Sampang” tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) memberikan deskripsi tentang tema-tema yang dijadikan retorika media, dalam hal ini *Detik.com* dan *Kompas.com*, dalam menyoroti persoalan toleransi antarumat beragama pada kasus “Syiah Sampang”, dan (2) menguraikan teknik-teknik jurnalisme dan kebahasaan yang digunakan oleh *Detik.com* dan *Kompas.com* dalam menyampaikan retorika tentang isu toleransi antarumat beragama dalam kasus “Syiah Sampang”.

Retorika, sebagaimana dikemukakan Loren Bagus (1996: 956), berarti seni berpidato. Kata retorika berasal dari bahasa Latin, *rhetorica*, atau bahasa Yunani, *retorike*. Apabila diberikan pengertian secara lebih komprehensif, retorika adalah seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah. Retorika dapat juga dimengerti sebagai seni menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Dalam pengertian ini, retorika merupakan cara untuk melakukan persuasi dengan berbagai teknik pembicaraan tertentu, sehingga pihak lain yang menjadi obyek atau sasarannya akan menerima argumentasi yang disampaikan pihak pembicara.

Dalam kajian komunikasi atau media massa, retorika dapat dimengerti sebagai penggunaan komunikasi secara strategis, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Terdapat dua hal penting yang dapat dibahas dalam domain ini. Pertama, sifat dasar bahasa yang digunakan dalam retorika adalah berciri strategis atau direncanakan (*intentional*). Kedua, pengetahuan yang menjadi tujuan retorika harus dikemas secara baik melalui bahasa yang digunakan oleh pihak yang menggunakannya (Kuypers dalam D'Angelo dan Kuypers [eds.], 2010: 288).

Salah satu kajian retorika yang paling klasik dan bahkan paling populer sampai saat ini dikemukakan oleh Aristoteles (382-322 SM). Terdapat tiga pokok persoalan yang disampaikannya untuk membahas retorika. Pertama, *logos* atau penalaran yang didasarkan pada rasionalitas atau argumentasi yang masuk akal (*logis*). Kedua, *ethos* atau penalaran yang didasarkan pada kredibilitas dari pihak yang menyampaikan pembicaraan (*speaker*). Dan, ketiga, *pathos* atau penalaran yang didasarkan pada emosi atau diarahkan pada bagaimana mengundang sisi emosional dari pihak sasaran dengan tetap berdasarkan pada kerangka pemikiran yang benar (Slagell dalam Schement [ed.], 2002: 897).

Hal lain yang dapat dikemukakan adalah ada tiga tujuan dalam retorika sebagai seni komunikasi persuasif. Pertama, *forensic* atau informatif, yang berarti retorika ini digunakan dalam persidangan. Termasuk juga di dalamnya adalah dalam kajian ilmu pengetahuan. Kedua, *deliberative* atau memobilisasi, yang pada umumnya digunakan dalam konteks perpolitikan untuk mengajak massa dalam menentukan suara dalam pemilihan umum. Ketiga, *epideictic* atau menghibur atau selebratoris, yang seringkali digunakan dalam pemakaman orang-orang ternama, perayaan hari keagamaan, atau momentum-momentum nasional lainnya (Sreberny-Mohammadi dalam Downing, Mohammadi, dan Sreberny-Mohammadi [eds.], 1990: 45).

Retorika tidak hanya dapat disampaikan oleh seseorang yang bertindak sebagai komunikator secara langsung dalam pembicaraan, seperti dalam penyampaian pidato atau tulisan yang serba menggugah. Retorika dapat dijalankan pula oleh pihak media. Hanya saja teknik-teknik persuasi yang digunakan pasti berbeda. Retorika, dalam domain ini, dapat dimengerti sebagai konstruksi dan manipulasi bahasa oleh pihak kreator teks untuk tujuan-tujuan yang bersifat mempengaruhi. Dalam retorika media semacam ini, hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana berbagai teks dalam media dihimpun menjadi teks media yang mempunyai keutuhan. Artinya adalah bagaimana teks-teks media itu bisa ditata dan menghadirkan makna tertentu. Dengan demikian, ada teknik-teknik tertentu, gaya bahasa tertentu, dan konvensi-konvensi tertentu yang dilakukan media dalam menyampaikan retorika (Long dan Wall, 2012: 24).

Untuk dapat menelusuri bagaimana teks-teks media menyampaikan retorika, maka media dianalisis bukan sebagai pihak yang secara organisatoris menyampaikan pesan-pesan tertentu. Media tidak pula dipandang dari perspektif khalayak yang lebih menonjolkan pada bagaimana mereka mengkonsumsi teks. Media dalam lingkup retorika ini dilihat sebagai teks itu sendiri. Dalam kedudukan demikian, apa yang bisa dikaji dari media adalah praktik-praktik teks yang dijalankan oleh pihak media. Dalam pendekatan diskursif, hal ini melibatkan lebih dari sekadar menyampaikan pesan-pesan secara terbuka. Dalam penggunaannya yang paling luas, sebuah teks media merupakan struktur penandaan tertentu yang menggunakan tanda-tanda dan kode-kode kultural untuk menyampaikan atau membangkitkan makna tertentu (Horsfield dalam Morgan [ed.], 2008: 118). Media dalam wilayah retorika ini dipandang

sebagai pihak yang mampu mengerahkan tanda-tanda dan kode-kode kebahasaan untuk menyampaikan makna yang dikehendaki atau diagendakan oleh pihak media.

Kajian yang lebih detail tentang teknik-teknik persuasif yang dilakukan media pernah dilakukan van Dijk (1988: 84-85). Dalam menjalankan persuasi biasanya media menggulirkan berbagai strategi berikut ini, yakni: A. *Memberikan penekanan sifat dasar peristiwa secara faktual*, dengan cara: (1) Deskripsi secara langsung peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi; (2) Menggunakan bukti dari saksi mata yang dekat dengan peristiwa; (3) Menggunakan bukti dari narasumber lain yang layak (pihak yang memiliki otoritas, orang-orang yang dihormati, para profesional); (4) Pemberian tanda yang mengindikasikan presisi dan ketepatan berbagai jumlah (bilangan) untuk orang, waktu, peristiwa, dan sebagainya; dan (5) Menggunakan kutipan langsung dari narasumber, khususnya ketika pendapat dilibatkan. B. *Membangun sebuah struktur relasional yang kuat*, dengan melakukan teknik: (1) Menyebutkan peristiwa-peristiwa sebelumnya sebagai syarat atau penyebab dan mendeskripsikan atau memprediksikan peristiwa-peristiwa selanjutnya sebagai akibat yang mungkin atau nyata; (2) Memasukkan fakta-fakta ke dalam model-model situasi yang telah dikenal yang menjadikan model-model situasi tersebut relatif lebih familiar jika tampil secara baru; (3) Menggunakan skrip-skrip dan konsep-konsep yang telah dikenal dengan baik yang berkaitan dengan skrip yang dimaksudkan; dan (4) Mencoba untuk mengorganisasikan fakta-fakta dalam struktur-struktur spesifik yang telah dikenal, misalnya naratif. Teknik yang terakhir adalah: C. *Menyajikan informasi yang memiliki dimensi-dimensi sikap dan emosi*, dengan teknik: (1) Fakta-fakta dihadirkan apabila mengundang emosi yang kuat; dan (2) mengemukakan opini sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu tema penting yang ditampilkan media adalah toleransi, dalam kaitan persoalan ini adalah toleransi antarumat beragama. Apa sebenarnya arti toleransi itu sendiri? Toleransi, ungkap Rainer Forst (2012), adalah pengertian yang berasal dari kata Latin *tolerare* yang berarti "betah, menyetujui, atau menderita". Toleransi secara umum merujuk pada penerimaan bersyarat atau tidak melakukan intervensi terhadap berbagai keyakinan, tindakan, atau praktik yang dipertimbangkan keliru, namun tetap dapat disetujui. Sehingga, tidak ada pelarangan atau pembatasan. Hal ini dapat dicontohkan ketika negara menoleransi agama minoritas.

Dalam ungkapan yang lebih lugas dapat ditegaskan bahwa toleransi hanya bisa direalisasikan ketika kelompok yang lebih dominan (mayoritas) memberikan ruang perbedaan bagi kaum minoritas. Soal keyakinan yang ditandai oleh keunikan dalam menjalankan peribadatan tidak diganggu, apalagi dikacaukan dengan aneka teknik kekerasan yang melecehkan harkat kemanusiaan. Hal ini terjadi karena perbedaan keyakinan tidak mungkin disatukan dalam keseragaman. Toleransi dibuktikan dengan adanya kesetujuan untuk menerima pihak lain sebagai entitas sosial yang tidak dapat ditundukkan dalam satu klaim kebenaran, apa pun namanya. Toleransi dapat dilihat pula ketika mayoritas menjalankan keyakinannya tidak sampai mengganggu pihak minoritas. Sehingga, kaum minoritas kerasan untuk tetap hidup di tempat tinggalnya.

Dalam pemikiran Forst (2012), toleransi memiliki empat konsepsi. *Pertama*, konsepsi pembolehan yang berarti pihak yang mempunyai otoritas atau mayoritas memberi pembolehan pada kaum minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinannya dengan syarat kaum minoritas menerima posisi dominan mayoritas. *Kedua*, konsepsi koeksistensi atau hidup bersama yang bermakna bahwa tidak ada lagi mayoritas atau minoritas karena semua berada dalam kesetaraan kekuasaan. Kedamaian sosial dan perwujudan kepentingan masing-masing pihak saling ditoleransi. *Ketiga*, konsepsi penghormatan yang terjadi ketika masing-masing pihak saling menghormati yang berbasis pada norma-norma yang diterima secara setara dan tidak memfavoritkan salah satu komunitas. *Keempat*, konsepsi penghargaan yang berarti tidak sekadar menghormati pihak lain, melainkan perbedaan diterima sebagai hal yang bernilai dan tetap dianut dengan alasan-alasan yang baik.

Jika dicermati secara jernih, empat konsepsi itu menunjukkan gradasi. Pada gradasi manakah negara kita berada? Agaknya, gradasi yang paling rendah sekalipun, yakni pembolehan, negara ini tidak bisa mewujudkannya. Meskipun kaum minoritas telah menerima berbagai syarat yang ditentukan oleh pihak mayoritas, tragisnya, perlakuan yang penuh prasangka dan diskriminatif tetap saja berlangsung. Semua ini dapat terjadi karena, selain negara melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi pada kaum minoritas, negara memiliki pembenaran secara legal. Hal ini dapat dilihat dalam perizinan membangun tempat ibadah yang bersifat diskriminatif. Selain itu, berbagai peraturan daerah

yang bernafaskan nilai agama tertentu marak disahkan.

Jalan keluar yang dapat dipilih dalam situasi yang rumit itu adalah seluruh umat beragama diperlakukan secara setara sebagai warga. Sebagaimana dikemukakan Jurgen Habermas (2004), penyatuan seluruh warga dalam bingkai budaya politik yang sama merupakan solusi. Warga diberdayakan dengan sama untuk mengembangkan identitas budaya dan tampil dengan keunikan budaya mereka. Tapi, hal itu hanya dapat terjadi kalau semua warga di bawah persyaratan yang berlaku bagi semua pihak, yakni mereka harus memahami menjadi warga dari satu dan komunitas politik yang sama.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Menurut van Dijk, analisis wacana kritis merupakan tipe penelitian analitis wacana yang secara primer mengkaji penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidakadilan yang dilakukan, direproduksi, dan dilawan oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan tipe penelitian semacam ini, analisis wacana kritis secara eksplisit mengambil posisi, dan dengan demikian ingin memahami, mengungkapkan, dan pada akhirnya menentang ketidakadilan sosial tersebut (van Dijk dalam Tannen, Schiffrin, dan Hamilton [eds.], 2001:352-371).

Obyek penelitian ini adalah berita-berita pada periode tahun 2013 yang berkaitan dengan permasalahan toleransi antarumat beragama yang ditampilkan oleh situs pemberitaan *Detik.com* dan *Kompas.com*.

Dalam mengumpulkan dan menganalisis berita-berita tentang isu toleransi antarumat beragama ini digunakan analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. van Dijk (1993). Pengumpulan dan analisis ini dilakukan pada skema berita (*news schema*) yang terdiri dari:

(a) *Judul berita* dan *teras berita* merupakan bagian yang mengekspresikan secara langsung proposisi-proposisi tingkat lebih tinggi dari wacana berita. *Judul berita* merupakan kategori pertama yang membuka sebuah wacana. Fungsi dari *judul berita* dan *teras berita* adalah sebagai ringkasan dan merupakan kategori yang paling nyata dari wacana berita; (b) *Reaksi-reaksi verbal* yang merujuk pada kutipan-kutipan dari pihak-pihak yang diwawancarai yang dihadirkan dalam wacana; (c)

Peristiwa utama yang menghadirkan deskripsi yang secara aktual merupakan berita itu sendiri; (d) *Konsekuensi-konsekuensi* yang mengorganisasikan seluruh peristiwa (kejadian) yang digambarkan sebagai hal yang digunakan sebagai alasan atau disebabkan oleh peristiwa utama; (e) *Komentar-komentar* yang memuat kesimpulan-kesimpulan, harapan-harapan, spekulasi-spekulasi, dan informasi lain pada peristiwa yang terdapat pada bagian akhir berita, namun kehadirannya tidak selalu harus ditampilkan dalam berita; dan, (f) *Latar belakang* berisi informasi yang bukan dari bagian peristiwa-peristiwa yang ditampilkan berita, seperti sejarah (kejadian-kejadian masa lalu dan sekarang), peristiwa-peristiwa sebelumnya (kejadian spesifik yang mendahului peristiwa utama dan dapat diperlakukan sebagai sebuah sebab dalam kondisi langsung), dan konteks (yang mengorganisasikan informasi pada situasi sekarang ini di mana peristiwa utama merupakan elemen yang penuh makna).

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis tekstual pemberitaan. Maksudnya adalah penelitian ini membahas struktur-struktur mikro (berita-berita yang dimuat *Detik.com* dan *Kompas.com*) saja, dan mengabaikan struktur-struktur makro dari kelompok-kelompok (jurnalis, pengamat, kelompok beragama minoritas, dan kalangan penentang kelompok beragama minoritas) dan lembaga-lembaga (surat kabar, pemerintah, dan berbagai organisasi keagamaan) yang melingkupinya.

Hasil penelitian

Konflik yang terjadi antara para penganut Islam Sunni dengan penganut Islam Syiah di Sampang, Madura, dihadirkan *Detik.com* bukan sebatas sebagai konflik sebuah keluarga, melainkan sebagai persoalan yang memiliki sebab dan akibat yang mengikutinya. Ada empat tema retorika yang disajikan oleh *Detik.com* sepanjang tahun 2013 dalam memberikan sorotan pada kasus ini, yakni sebab-sebab dan solusi yang ditawarkan sejumlah pihak; kontroversi tentang penempatan pengungsi yang terusir dari kampung halamannya sendiri; keberadaan kaum Syiah Sampang yang mendapatkan penolakan dari warga setempat, tapi serentak dengan itu kaum Syiah pun melakukan perlawanan untuk memperlihatkan eksistensinya; dan, hukuman yang tetap diberikan kepada Tajul Muluk, tokoh Syiah, dan dibebaskannya Rois Alhukama dari pihak Sunni yang menimbulkan hilangnya rasa keadilan dalam kasus ini.

Penyerbuan kaum mayoritas muslim Sunni terhadap kaum minoritas muslim Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur dihadirkan *Kompas.com* dalam berbagai sudut pandang pemberitaan. Bukan hanya peristiwa pengusiran para pengikut Syiah yang menjadi fokus perhatian media online itu, melainkan terdapat sejumlah pokok persoalan yang menyertainya juga dibicarakan. Terdapat empat tema yang dihadirkan *Kompas.com* selama tahun 2013 tentang kejadian itu, yakni gugatan terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak mampu menangani konflik itu; keinginan kalangan pengungsi untuk pulang ke kampung halaman mereka; perdebatan tentang pertobatan yang harus dijalankan para pengikut Syiah; dan islah, perdamaian, atau rekonsiliasi yang berhasil dilakukan kalangan bawah pada level lokal yang justru diragukan atau hendak dimentahkan kembali oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.

Pembahasan

1. Strategi retorika *Detik.com*

a. Sikap pemerintah, pokok persoalan, dan penyelesaian persoalan

Pada tema yang menyoroti keberadaan dan sikap pemerintah dalam mengatasi konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, dapat disimak secara langsung dalam bagian judul berita. Apabila pernyataan yang menjadi rujukan dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, terlebih lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka nama yang bersangkutan (SBY) dijadikan *headline*. Jika ada nama lain, maka disebutkan jabatannya, seperti misalnya Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Gubernur Jawa Timur. Itulah *headline* yang menonjolkan unsur berita siapa (*who*) karena pihak narasumber dipandang media memiliki daya tarik sebagai akibat memenuhi kriteria nilai berita popularitas. Sementara itu jika yang diberikan penekanan adalah persoalan apa (*what*), misalnya akar persoalan konflik dan penyelesaiannya, maka hal itu dijadikan *headline* juga.

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber yang memiliki otoritas (kewenangan) dianggap lebih penting dan sangat menentukan dalam pembicaraan. Narasumber itu tidak saja menduduki jabatan yang penting dan strategis, tapi juga dianggap sebagai sosok yang mampu dan memang harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang sedang terjadi. *Headline* yang sudah secara terbuka menonjolkan kedudukan kalangan narasumber

dijabarkan secara lebih detail pada bagian *lead* (teras berita) yang secara dominan memuat ringkasan dari keseluruhan substansi berita.

Beberapa hal yang dapat dikemukakan dalam tema ini, adalah: Pertama, jika narasumber berita berasal dari pihak pemerintah (presiden, gubernur, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden), maka hal yang ditampilkan adalah ekspresi norma tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dalam masyarakat majemuk, optimisme masalah dapat diatasi, melempar tanggung jawab kepada pihak lain, dan pilihan-pilihan yang mungkin dijalankan untuk menyelesaikan persoalan. Narasumber ini sekadar diposisikan untuk menampilkan manajemen impresi (pengaturan kesan) yang baik di hadapan khalayak.

Kedua, jika yang menjadi narasumber adalah lembaga pemerintah (LPSK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka uraian yang disampaikan adalah kecaman terhadap pemerintah yang dianggap lambat menangani persoalan, deskripsi yang berisi sebab-akibat konflik, dan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dan, ketiga, pada tema ini juga dapat ditemukan bahwa akar persoalan konflik Sunni-Syiah di Sampang bukanlah karena konflik antara Rois Alhukama dan Tajul Muluk, melainkan adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam level lokal, dari ulama, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat yang berkelindan dengan persoalan hukum dengan ditetapkannya Tajul Muluk sebagai terpidana dalam kasus penodaan ajaran agama. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah sebetulnya rekomendasi yang meminta pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan wakil rakyat untuk mengambil langkah-langkah penciptaan perdamaian.

b. Nasib pengungsi

Narasumber dari pihak yang dipandang memiliki otoritas masih mendominasi dalam tema retorika yang menghadirkan nasib pengungsi. Pihak pemerintah pusat, dalam hal ini adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dikutip komentar mereka sebagai pihak yang menunjukkan rasa simpati kemanusiaan dan harapan. Kapan pengungsi bisa pulang dan alasan keselamatan ditonjolkan dalam bagian ini.

Sedangkan pihak Pemerintah Daerah Jawa Timur yang dirujuk komentarnya adalah Gubernur Soekarwo. Dalam pernyataan itu Soekarwo

memperlihatkan sikap cenderung tidak peduli terhadap nasib pengungsi dengan mengemukakan bahwa pihak yang menghendaki pengungsi adalah pengungsi itu sendiri. Komentar Gubernur Soekarwo lainnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyediakan "rumah cinta" bagi para pengungsi. Hal itu adalah sebetulnya eufemisme bahwa para pengungsi dapat memanfaatkan tempat pengungsian itu selain untuk berlindung, mereka pun bisa melakukan hubungan seks. Ada kesan sikap masa bodoh dan mengolok-olok para pengungsi yang dikemukakan oleh Gubernur Soekarwo. Hal lain yang menarik adalah *Detik.com* memakai frasa "Rumah Baru" untuk merujuk tempat pengungsian tersebut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai pihak lain yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan beragama di Indonesia, dikutip pula dalam tema ini. Organisasi ini menyatakan harapan bahwa para pengungsi bisa segera pulang menuju kampung halaman mereka. Sedangkan pihak aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikutip pernyataannya dalam kaitan dengan penilaian bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak serius dalam menangani kehidupan pengungsi. Hal ini terlihat dari ketidaklayakan fasilitas yang diakses para pengungsi.

Pengungsi, sebagai pihak yang dibicarakan nasibnya dalam tema ini, sekadar dikutip pernyataannya secara sekilas. Hanya saja efek dramatis dari pernyataan secara langsung itu sengaja ditonjolkan. Misalnya saja, ancaman massa yang akan membakar Gedung Olah Raga (GOR) Sampang dituliskan dalam bagian teras berita. Di samping hal itu, pernyataan secara langsung dari istri Tajul Muluk, Ummu Kulsum, dihadirkan. Ketika dia mengatakan bahwa pengungsi diusir bagaikan binatang, maka efek itu memberi perasaan empati yang mendalam bagi khalayak.

Narasumber yang dianggap memiliki kelayakan berita, baik karena jabatan di pemerintahan pusat dan daerah, maupun akibat berposisi sebagai ketua organisasi masyarakat, disebutkan secara langsung dalam *headline*. Otoritas mereka semakin dikuatkan dengan teknik jurnalistik semacam itu. Pernyataan aktivis lembaga non-pemerintah dan para pengungsi dijadikan judul pemberitaan, sementara itu identitas mereka baru diketahui dalam teras berita atau tubuh berita. Apa yang dapat ditegaskan adalah *Detik.com* dalam menyoroti nasib pengungsi mengutamakan *headline* bercorak *who* (siapa) ketika merujuk narasumber pemerintah. Sebaliknya, ketika narasumber itu dari pengungsi atau aktivis LSM, maka identitas mereka

sengaja diposisikan dalam bagian teras berita atau tubuh berita. Sehingga, *headline* yang sengaja ditampilkan bercorak *what* (apa). Hal itu memperlihatkan bahwa kehadiran para pengungsi itu sendiri tidak diposisikan sebagai prioritas dalam pemberitaan. Mereka dipandang tidak memiliki popularitas dan dampak yang berarti secara sosial. Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa teras berita dalam topik ini bertipe *summary lead* karena memberikan ringkasan keseluruhan substansi berita.

c. Mayoritas menolak, minoritas melawan

Jika pada dua tema sebelumnya terdapat penonjolan nama-nama narasumber dari pihak yang berotoritas pada bagian *headline*, maka pada tema penolakan terhadap kembalinya para pengungsi Syiah tidaklah demikian. Narasumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya ditampilkan pada bagian teras berita. Mereka secara mendasar menyatakan bahwa para pengungsi Syiah belum bisa kembali ke kampung halaman akibat masih kuatnya penolakan yang dikemukakan oleh mayoritas penganut Sunni. Jadi, bisa ditegaskan, kedua narasumber dari pemerintah tersebut seolah-olah diposisikan sebagai juru bicara kalangan mayoritas Sunni.

Strategi yang dilakukan oleh kedua narasumber, yakni salah seorang pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Menko Polhukam Djoko Suyanto, menolak kepulangan para pengungsi Syiah adalah dengan cara mengemukakan alasan-alasan, misalnya ancaman, kemanusiaan, dan keyakinan yang tidak dapat dikompromikan. Mengemukakan argumentasi dan menekankan sebab-akibat merupakan mekanisme yang digunakan oleh narasumber dalam menjelaskan ketidaksudian warga mayoritas Sunni menerima kepulangan minoritas Syiah.

Berlainan halnya ketika pihak minoritas Syiah melakukan perlawanan untuk menuntut hak mereka pulang kembali ke kampung halaman. Bagian *headline* berita itu secara sangat eksplisit menyebutkan keberadaan mereka. Memang benar bahwa nama-nama pengungsi tersebut tidak disebutkan secara terbuka karena mereka dinilai tidak populer sehingga kurang layak diberitakan. Tapi sebutan "pengungsi Syiah" yang menjalankan aksi bersepeda ke Jakarta serta melakukan demonstrasi di depan Istana Negara untuk meminta perlindungan dan menuntut mereka bisa dipulangkan ke kampung halaman sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa warga Syiah memang memiliki eksistensi. Inilah sebetulnya perlawanan

terhadap dominasi warga Sunni dan siapa pun yang menolak kepulangan para pengungsi Syiah.

Ketika kalangan pengungsi Syiah itu secara langsung menjadi narasumber dalam berita, yang berarti tidak disampaikan oleh pihak lain, maka keberanian mereka untuk berbicara terbukti. Terdapat aspek-aspek dramatis yang sengaja dihadirkan pada pemberitaan semacam itu. Misalnya, ada aspek viktimisasi yang menjadikan kalangan pengungsi Syiah terkesan benar mengalami penderitaan. Terlebih lagi juga diuraikan bagaimana pengungsi Syiah secara gigih bersepeda menempuh jarak dari satu kota ke kota lain untuk memperjuangkan nasib mereka dan anak-anak yang mengalami kesengsaraan. Hal itu juga dapat dibaca pada bagian *lead*, yang merangkum esensi pemberitaan, tentang sikap mereka yang tidak pantang menyerah. Bagian teras berita pada pemberitaan yang menyuarakan penolakan terhadap kepulangan para pengungsi Syiah juga menggukankan *lead* yang bercorak ringkasan.

d. Hukum memihak kelompok mayoritas

Hukum bukanlah keadilan. Bahkan, hukum bagi kalangan minoritas adalah sebetulnya cara yang dimiliki negara untuk memenangkan kelompok mayoritas. Hukum pada akhirnya memang tidak lebih dari instrumen yang dimiliki oleh kaum mayoritas untuk menyingkirkan kelompok minoritas. Itulah yang dialami pula oleh kelompok minoritas Syiah. Mereka terusir dari kampung halaman. Mereka tidak boleh pulang ke tempat asal. Belum cukup dengan itu, pemimpin mereka, Tajul Muluk, dinyatakan sebagai pelaku penodaan terhadap agama Islam oleh pihak negara.

Konklusi ini dapat disimak pada bagian tema retorika yang mengemukakan bahwa kelompok minoritas makin tertindas, sementara itu kaum mayoritas semakin mendapatkan kemenangannya. Hal yang menarik adalah berita mengenai hukuman yang harus diterima Tajul Muluk tidak merujuk pada seorang narasumber pun. Berita itu ditampilkan *Detik.com* sebagai salinan sangat ringkas dari putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Apa atau pun siapa yang tertulis dalam pemberitaan itu adalah "panitera dalam websitenya". *Lead* yang berisi substansi pemberitaan itu menyajikan *summary* tentang hukuman selama 4 tahun yang harus dijalani Tajul Muluk. Nama Tajul Muluk, mungkin karena kurang populer, tidak tercantum dalam judul berita. Maka, *headline* berita itu pun tertulis "pemimpin Syiah" atau "tokoh Syiah".

Berlainan halnya dengan pihak Sunni. Nama-nama pelaku kerusuhan, baik yang masih dalam tahap penuntutan maupun telah berada dalam tahap vonis, ditulis secara jelas. Terlebih lagi ketika Rois Alhukama (ada juga yang menyebutnya sebagai Roisul Hukama) mendapatkan pembebasan dari segala tuduhan hukum sebagai tokoh yang menggerakkan massa untuk menyerbu, mengusir, dan menganiaya kelompok Syiah. Identitasnya sebagai penganut Syiah yang berkedudukan sebagai mayoritas tidak dituliskan. Rois ditulis sebagai "pelaku kerusuhan". Penghilangan identitasnya sebagai tokoh Sunni menyelamatkan kelompok mayoritas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Seakan-akan Rois merupakan sepeggal kepingan yang tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan kelompok mayoritas Sunni di Sampang.

Persoalan yang lebih menarik lagi adalah ketika Rois dibebaskan, maka sikap atau pernyataannya tentang persidangan dihadirkan secara eksplisit dalam bagian judul berita. Hakim yang mengadilinya dianggap telah mampu bertugas dengan baik. Keadilan yang seharusnya dia dapatkan akhirnya diperoleh pula. Pihak Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menjalankan penuntutan hukum pun hanya dikabarkan bakal mengajukan kasasi. Semua berita tentang dibebaskannya Rois dan keinginan jaksa untuk mengajukan kasasi dapat dibaca substansinya pada bagian *lead*. Sebabnya adalah *lead* pada berita yang berisi berpihakannya hukum untuk menguntungkan kaum mayoritas itu memuat substansi kejadian tersebut.

2. Strategi retorika Kompas.com

a. Mempertanyakan kemampuan pemerintah

Tema yang memuat gugatan terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak tanggap dan tegas dalam menyelesaikan konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, menampilkan berbagai narasumber dari sejumlah latar belakang. Anggota DPR yang berposisi berseberangan dengan pemerintah dihadirkan sebagai pihak yang mengkritik secara langsung sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terlebih lagi, Presiden Yudhoyono pada konteks persoalan ini baru saja meraih World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (CAF) karena dinilai mempunyai kemampuan dalam menciptakan iklim toleransi beragama yang baik di Indonesia. Ironisnya, penghargaan sebagai negarawan itu tidak memiliki pengaruh apa pun dalam penyelesaian konflik Sunni-Syiah ini.

Sebaliknya, jika narasumber berasal dari pihak pemerintah, misalnya salah seorang menteri yang membantu tugas-tugas kepresidenan, maka berbagai pujian tentang kehebatan Presiden Yudhoyono yang berhasil menciptakan iklim toleransi dan peningkatan laju ekonomi disodorkan secara bertubi-tubi. Sementara itu, Presiden Yudhoyono dihadirkan sebagai sosok yang menampilkan berbagai ekspresi norma dan terkesan mengalami kesedihan ketika mengetahui peristiwa konflik ini. Pihak lain dari posisi pemerintah adalah Gubernur Jawa Timur yang digambarkan menunjukkan sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap pengungsi, terutama pada kasus kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada para pengungsi Syiah. Pejabat lain yang ditampilkan melemparkan tanggung jawab adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya mampu menyelesaikan persoalan ini secara lebih manusiawi.

Penonjolan berbagai narasumber yang dipandang sangat layak untuk dijadikan *headline* dengan merujuk pada sejumlah komentar mereka, terutama karena jabatan sehingga memiliki kewenangan yang menentukan, menunjukkan bahwa peristiwa konflik Sunni-Syiah di Sampang ini memang merupakan persoalan yang sangat serius. Tanggapan mereka adalah sebetulnya tanggung jawab sekalipun dalam tataran yang masih sangat verbal. Hal lain yang bisa dilihat adalah hadirnya sumber-sumber yang memiliki otoritas dalam jabatan kenegaraan memang dimaksudkan untuk menghadirkan harapan bahwa kasus konflik ini dapat segera tuntas diselesaikan.

Hanya saja kalau dilihat dari aspek gaya bahasa dan muatan penjelasan yang disampaikan oleh berbagai sumber yang dihadirkan dalam tema ini, maka hal yang dapat disimak adalah satu sama lain saling mengemukakan klaim. Pihak yang berseberangan dengan Presiden Yudhoyono menunjukkan pesimismenya. Pihak yang berada dalam satu kubu dengan Presiden Yudhoyono, sebaliknya, menonjolkan klaim keberhasilannya. Pihak yang berada dalam kedudukan sebagai anggota dewan yang memberikan pertimbangan bagi presiden justru sekadar menunjukkan harapan-harapannya dan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh Gubernur Jawa Timur menunjukkan sikap pura-pura bodoh (*pseudo-ignorance*), terutama dalam kasus pemberian BLSM untuk warga Syiah

Sampang.

b. Keinginan pengungsi pulang ke kampung halaman

Hanya satu keinginan yang berada dalam benak kalangan pengungsi Syiah Sampang, yakni pulang kembali ke kampung halaman mereka. Tapi, keinginan itu pada akhirnya tinggal berujung sebagai harapan yang hampa. Sebabnya adalah pihak masyarakat, mayoritas Sunni, menyatakan penolakan yang keras. Sikap warga Sunni ini—sebagaimana dikemukakan dalam berbagai pernyataan pemerintah—seakan-akan tidak bisa dikompromikan. Bahkan, penolakan yang sangat keras ini dikemukakan oleh seorang ulama di sana yang menyatakan keberadaan warga Syiah memang sudah tidak dikehendaki lagi. Alasannya adalah warga Syiah memiliki pemahaman agama yang sangat berlainan dengan masyarakat sekitarnya. Mereka juga sudah diajak untuk kembali ke ajaran agama mayoritas, tetapi mereka tetap melakukan penolakan.

Sikap keras mayoritas masyarakat tersebut juga ditentang dengan keteguhan warga Syiah. Mereka melancarkan perlawanan. Caranya bukan dengan menghadapi warga mayoritas Sunni secara langsung, melainkan dengan teknik yang unik, yaitu mereka bersepeda menuju ke Jakarta. Mereka menuntut janji Presiden Yudhoyono supaya menyelesaikan persoalan intoleransi yang masih terjadi, dan bahkan mereka menjadi korbannya. Selain itu, mereka pun meminta agar dikembalikan ke kampung halaman mereka. Aksi demonstrasi dengan cara bersepeda ini adalah suatu langkah yang cerdas di tengah kepungan ancaman yang mereka terima. Tidak hanya itu, pihak anak-anak pun terlibat dalam aksi perlawanan tersebut. Anak-anak itu memang tidak pergi ke Jakarta sebagaimana orang tua mereka. Anak-anak itu tetap di pengungsian dan membacakan sejumlah puisi yang isinya menuntut supaya mereka dipulangkan ke tempat asal. Mereka juga mengetuk pintu hati Presiden Yudhoyono untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini.

Narasumber lainnya yang ditampilkan dalam tema retorika tentang tuntutan pengungsi untuk dipulangkan adalah kalangan pengungsi itu sendiri. Dari anak-anak sampai dewasa hadir dalam ruang berita. Aktivis LSM juga ditampilkan sebagai pendamping yang ikut menyuarakan aspirasi warga Syiah itu. Dalam domain tematik ini, pihak yang dijadikan narasumber bukan saja mereka yang dekat dan mampu memberikan kesaksian secara langsung, melainkan bahkan para pelakunya

sendiri. Dukungan yang menyatakan bahwa pengungsi harus segera dipulangkan, dan lebih dari itu pendapat yang mengatakan relokasi bukan merupakan solusi yang baik untuk penyelesaian kasus Sampang, pun dikemukakan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, pada wilayah tema ini, pihak pemerintah pusat dideskripsikan memberikan dukungan kepada warga pengungsi Syiah, sekalipun masih bersifat implisit.

Dalam tema ini, warga Syiah benar-benar menjadi subyek yang bisa berbicara sendiri. Kalau pun ada pernyataan pendukung dari narasumber lain bisa dikatakan lebih bersifat sebagai pendapat yang menguatkan. Hal itu bisa dilacak pada *headline* yang secara eksplisit menuliskan frasa “warga Syiah”. Gaya bahasa yang digunakan dalam domain tematik ini lebih banyak memberikan deskripsi empati tentang penderitaan warga Syiah serta gambaran tentang kondisi pengungsian yang tidak nyaman. Secara keseluruhan, lead pada bagian tema ini merupakan rangkuman (*summary*) dari seluruh isi berita.

c. Kelompok minoritas harus bertobat

Tema retorika tentang pertobatan yang harus dijalankan warga minoritas Syiah mendapatkan ruang yang besar dalam pemberitaan *Kompas.com*. Hal ini dikarenakan tobat merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa ajaran Syiah yang selama ini diikuti kalangan minoritas ternyata sesat. Dan, apa pun yang sesat pasti diganjar dengan aksi-aksi hukuman, baik secara sosial maupun spiritual. Hukuman sosial dalam wujud menyatakan bertobat secara terbuka, menjalankan penandatanganan di atas kertas bermeterai, dan disaksikan oleh aparat pemerintah, polisi, dan ulama adalah sebuah teknik untuk menghancurkan keberadaan warga Syiah. Ketika mereka dipaksa untuk memberikan pengakuan bahwa mereka bersalah secara sosial, dan keliru pula secara keagamaan, maka perlawanan pun mereka untkapkan.

Dalam tema ini terjadi “perang retorika” secara terbuka antara pihak yang menyepakati tobat, menentang tobat, dan pihak yang berupaya dalam posisi netral. Pihak yang menyepakati warga Syiah untuk melakukan tobat adalah kalangan ulama di Madura dan Menteri Agama Suryadharma Ali. Memang, dukungan Menteri Agama hanya bersifat implisit. Tapi, dukungan yang diberikan terhadap pertobatan yang bersifat memaksa itu dikemasnya dalam frasa “penyamaan persepsi”. Persepsi dalam hal ini dapat disepadankan dengan pemaknaan

terhadap ajaran. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak seiring atau serupa dengan interpretasi yang diberikan pihak mayoritas, maka mereka harus memberikan pengakuan bersalah.

Di samping itu, Menteri Agama juga berpandangan bahwa konflik yang terjadi di Sampang merupakan pertikaian antara warga Sunni dengan "kelompok Tajul Muluk". Apa yang dilakukan Menteri Agama adalah sengaja mengecilkan keberadaan warga Syiah di Sampang. Seakan-akan jumlah mereka hanya dapat diukur dari sebuah nama tokoh saja. Model pernyataan yang secara sengaja menghilangkan eksistensi kelompok minoritas itulah yang disebut sebagai aksi-aksi eksklusif yang dilakukan oleh para pendukung kelompok mayoritas. Hal itu pula yang dikemukakan oleh seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempunyai pandangan bahwa warga Syiah harus mendaftarkan keyakinannya sebagai agama baru di Kementerian Agama. Selain itu, kesalahan warga Syiah, menurut sang politisi, ialah melanggar kemapanan yang sudah terjadi dalam masyarakat.

Kelompok kedua yang ditampilkan adalah para penentang tobat, yakni kaum Syiah dan para pendukungnya. Hal menarik yang pantas diungkapkan adalah berita tentang tobat yang dipaksakan itu pada awalnya dihembuskan oleh aktivis LSM. Namun, pada berita berikutnya, pihak yang dipaksa bertobat langsung dihadirkan sebagai narasumber dan bahkan, lebih dari itu, pernyataannya ditonjolkan dalam bagian *headline* bahwa dia akan dibunuh kalau tidak bertobat. Penyajian bukti, dan bukan sekadar pernyataan, menjadi motif berita semacam ini. Nasib pihak yang dipaksa bertobat itu digambarkan sedemikian terluntalunta karena harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang akan memaksa. Kalangan pendukung pihak yang menentang tobat, selain aktivis LSM, adalah mantan pejabat negara (Jusuf Kalla), pejabat pusat pemerintahan, dan tokoh lembaga keagamaan. Dengan demikian, tobat yang dipaksakan digambarkan sebagai perilaku yang arogan dan tidak bisa diterima dalam tatanan negara yang menganut kebebasan berkeyakinan.

Pihak ketiga yang juga ditampilkan, sekalipun dalam derajat yang sangat kecil, adalah pejabat yang berada dalam posisi netral. Pejabat yang dimaksudkan adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan sangkalannya bahwa telah terjadi pertobatan yang dipaksakan itu. Dia juga menyatakan bahwa negara tidak berada dalam wilayah pertobatan. Sebab, hal itu merupakan urusan masing-masing warga. Dengan

cara seperti ini, Menteri Dalam Negeri tidak ingin terlibat dalam debat yang sangat sengit itu sekaligus berupaya melepaskan diri dari kontroversi yang ada.

Strategi retorika yang digunakan dalam tema ini adalah *headline* dituliskan sesuai dengan identitas narasumber yang diikuti oleh pernyataan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para narasumber hendak diposisikan secara tegas sesuai dengan masing-masing status sosialnya. Sementara itu, intro yang digunakan dalam tema ini adalah *summary* yang berarti menampilkan rangkuman dari seluruh isi pemberitaan.

d. Menolak inisiatif berdamai dari arus bawah

Islah, perdamaian, rekonsiliasi, atau apa pun nama dan konsep lainnya adalah cara untuk mengakhiri pertikaian di antara dua kelompok. Islah itu sudah dirintis dari kalangan akar rumput masyarakat di Sampang, Madura. Para pihak yang melakukan pertikaian, terutama pelaku kekerasan, menyatakan secara terbuka bahwa penyerbuan kaum mayoritas Sunni terhadap kelompok minoritas Syiah tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga, kelompok penganut Syiah mengemukakan alasan serupa yang menegaskan bahwa konflik itu hanya membuat mereka mengalami ketersingkirkan. Ironisnya, ketika benih-benih untuk merintis islah yang dijalankan oleh kalangan masyarakat bawah itu hendak bertumbuh justru diragukan dan bahkan dimatikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.

Pada tema retorika ini ada beberapa figur yang dilibatkan. Pertama, adalah pihak aktivis LSM yang menyatakan bahwa rekonsiliasi Syiah sudah mulai dilakukan. Hanya saja karena, dalam perjalanan berikutnya rekonsiliasi itu seakan-akan diabaikan dan disangkal oleh Menteri Agama, maka mereka mengajukan tuduhan bahwa ada pihak tertentu yang sengaja melakukan penggemosan terhadap islah tersebut. Hal ini merupakan peristiwa yang patut disayangkan karena islah itu sebenarnya merupakan prakarsa dari masyarakat yang berada dalam arus bawah. Setidaknya, itulah alasan yang dikemukakan oleh aktivis LSM tersebut. Kalangan aktivis LSM ini juga dapat disebut sebagai pihak yang menyuarakan dan mengadvokasi kelompok minoritas Syiah yang tidak mampu berbicara.

Kedua, pihak yang melakukan penolakan terhadap islah yang sudah berjalan. Secara implisit pihak yang menjalankan tindakan ini adalah Menteri Agama. Dalih yang dikemukakan adalah islah harus menyertakan semua pihak, terutama kalangan ulama dan pemerintah. Menteri Agama

menyatakan kalau pemerintah sengaja tidak dilibatkan dalam proses itu, maka ada agenda yang sedang dimainkan pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah. Demikian pula, ketika ulama yang berada di Madura tidak dilibatkan, maka islah itu, kata Menteri Agama, tidak bisa dikatakan sah. Persoalannya adalah kalangan ulama itu sendiri bersikap menentang keberadaan kelompok Syiah. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, mempersyaratkan bahwa islah hanya bisa dilakukan jika apa yang disebut sebagai "penyamaan persepsi" sudah dijalankan. Padahal, program menyamakan persepsi ini tidak lain merupakan cara untuk mengubah keyakinan kelompok Syiah.

Ketiga, kelompok yang mendorong secara moderat islah supaya diteruskan. Mereka yang berada dalam posisi ini adalah seorang anggota DPR, anggota organisasi kemasyarakatan, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pada dasarnya mereka sepakat islah harus diteruskan. Apa yang harus dijalankan oleh kalangan yang berkeinginan mendapatkan perdamaian adalah melakukan sosialisasi supaya proses dan hasil islah itu dapat diketahui oleh semakin banyak orang. Figur yang akan dilibatkan dalam islah adalah Jusuf Kalla. Sebab, sosok ini dianggap mempunyai pengalaman untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai di Indonesia. Ketokohan menjadi hal yang penting dalam islah ini.

Pemilihan tokoh yang dianggap populer menjadi hal penting untuk dijadikan *headline* dalam tema retorika ini. Pernyataan dan posisi mereka yang berotoritas ini sangat ditonjolkan dalam bagian judul berita. Hal itu terbaca semakin jelas pada bagian *lead* yang memuat rangkuman (*summary*) substansi pemberitaan. Sementara itu, baik kelompok Syiah maupun kelompok Sunni, justru tidak dimunculkan secara langsung dalam domain tematik ini. Suara-suara mereka seakan-akan diwakilkan kepada para pihak yang terlibat dalam perdebatan. Aspek-aspek konflikual, terutama yang ditunjukkan oleh Menteri Agama dalam menolak islah, sengaja ditonjolkan.

Penutup

Dalam perspektif Aristotelian dan berbagai buku teks tentang retorika, ada tiga teknik dasar untuk mempersuasi orang lain agar mau menerima gagasan pihak lain. Demikian juga dalam kasus retorika media, dalam kaitan adalah ini *Detik.com* dan *Kompas.com*, yang membahas tentang toleransi antarumat beragama, ketiga teknik pokok tadi juga

dihadirkan. Ketiga teknik retorika media yang dimaksud adalah:

Pertama, *ethos*. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pihak yang ditetapkan sebagai narasumber dalam pemberitaan oleh pihak media karena mereka dinilai mempunyai kredibilitas, terutama adalah otoritas dalam pengambilan keputusan. Di sini akan terlihat dominasi pejabat negara, dari presiden sampai gubernur, berposisi sebagai narasumber. Pihak lain yang juga dipandang media memiliki otoritas adalah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diposisikan sebagai pihak yang menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat atau pengungsi Syiah yang berada dalam posisi marginal. Sementara itu para pengungsi tidak mendapatkan tempat sebagai aktor yang menentukan nasib mereka. Dalam perspektif teknik jurnalistik, maka dapat dikatakan bahwa media masih menunjukkan hukum besi yang disebut sebagai *name makes news*.

Kedua, *logos*. Artinya adalah isi pesan yang berisi argumentasi dan berbagai pernyataan yang menunjukkan rasionalitas. Bisa dikatakan bahwa logis atau tidak logis pernyataan narasumber berada dalam domain ini. Apa yang disebut logis dalam kasus ini adalah apakah pernyataan narasumber dianggap mampu menyelesaikan masalah atau, sebaliknya, justru semakin memperumit masalah. Pernyataan yang logis dalam domain toleransi antarumat beragama terjadi jika penalaran yang dimaksudkan mampu menghargai perbedaan. Pihak yang berlainan keyakinan dibiarkan untuk menunjukkan eksistensinya. Sebaliknya, pernyataan yang tidak logis terjadi ketika keyakinan kaum minoritas justru dicurigai dan dianggap sesat, serta pada akhirnya hanya bisa diselesaikan dengan cara mendominasinya atau menyingkirkannya.

Ketiga, *pathos*. Dalam hal ini adalah kemampuan dari pihak media untuk menghadirkan pernyataan dan sejumlah kejadian yang menimbulkan perasaan haru, jengkel, marah, kasihan, atau tidak habis pikir. Dalam kasus ini, rasa belas kasih sengaja ditonjolkan media terutama dalam menyoroti nasib minoritas Syiah. Artinya adalah kemampuan tersebut ditampilkan media dengan cara menghadirkan para pengungsi yang mengalami penderitaan berkepanjangan di tempat pengungsian. Harapan para pengungsi untuk bisa pulang ke kampung halaman, aksi bersepeda beberapa pengungsi yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bisa menyelesaikan kasus ini, dan puisi-puisi yang diciptakan oleh anak-anak merupakan bagian yang sengaja dihadirkan media untuk mengundang perasaan haru.

Daftar Pustaka

- Bagus, Lorens (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Forst, Rainer (2012). "Toleration", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/toleration/>.
- Habermas, Jurgen (2004). "Religious Tolerance—The Pacemaker for Cultural Rights", *Philosophy* 79.
- Horsfeld, Peter (2008). "Media" dalam David Morgan (ed.), *Key Words in Religion, Media and Culture*. New York dan London: Routledge.
- Kuypers, Jim A. (2010). "Framing Analysis from A Rhetorical Perspective" dalam Paul D'Angelo dan Jim A. Kuypers. *Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives*. London dan New York: Routledge.
- Long, Paul dan Tim Wall (2012). *Media Studies: Texts, Production, Context*. Birmingham: Pearson.
- Slagell, Amy R. (2002). "Rhetoric" dalam Jorge Reina Schement (ed.). *Encyclopedia of Communication and Information: Volume 3*. New York: Macmillan Reference.
- Sreberny-Mohamadi, Annabelle (1990). "Forms of Media as Ways of Knowing" dalam John Downing, Ali Mohammadi dan Annabelle Sreberny-Mohammadi (eds.). *Questioning the Media: A Critical Introduction*. New Delhi: Sage Publications.
- van Dijk, Teun A. (1988). *News as Discourse*. Hove dan London: Lawrence Erlbaum Associates.
- van Dijk, Teun A. (2001). "Critical Discourse Analysis" dalam D. Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton (eds.), *Handbook of Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell.